

## Tata Kelola Pemerintahan Kota Medan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Satwa di *Medan Zoo*

Deanna Janeta Perdana Napitupulu<sup>1</sup>, Muhammad Imanuddin Kandias Saraan<sup>\*2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Sumatera Utara, Medan, 20222, Indonesia

\*Corresponding Author: [muhammadimanuddin@usu.ac.id](mailto:muhammadimanuddin@usu.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: November 26<sup>th</sup>, 2025

Revised: December 10<sup>th</sup>, 2025

Production: December 30<sup>nd</sup>, 2025

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/sajjana/>

---

E-ISSN: 3090-885X

---

### ABSTRAK

Tata kelola merujuk pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, serta pengarahan yang menggambarkan bagaimana pemerintahan berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks pemerintahan untuk memenuhi kepentingan publik. Tata kelola yang baik memerlukan dukungan dari struktur organisasi yang kuat, strategi dan inovasi yang terus berkembang, serta adanya regulasi yang mendukung dari pihak pemerintah. Pemko Medan, sebagai pengawas *Medan Zoo*, bertanggungjawab terhadap kondisi kesejahteraan satwa dan fasilitas yang ada di *Medan Zoo*. Namun, dalam praktiknya tata kelola yang diterapkan oleh Pemko Medan tidak berjalan dengan optimal. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena tata kelola pemerintahan Kota Medan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan satwa di *Medan Zoo*. Adapun analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teori Indikator Tata Kelola Pemerintahan yang baik menurut Mahsun (2018) yaitu aspek transparansi, aspek akuntabilitas dan aspek partisipasi.

**Kata Kunci:** Tata Kelola Pemerintahan, Pemerintahan Kota Medan, *Medan Zoo*

---

### ABSTRACT

*Governance refers to the processes of planning, implementation, management, and direction, describing how government interacts with the public within the context of governance to fulfill the public interest. Good governance requires the support of a strong organizational structure, continually evolving strategies and innovations, and supportive government regulations. The Medan City Government, as the supervisor of Medan Zoo, is responsible for the welfare of the animals and facilities at Medan Zoo. However, in practice, the governance implemented by the Medan City Government is not optimal. The results of this study, the governance of the Medan City Government in improving animal welfare at Medan Zoo is not optimal. The Medan City Government as the supervisor of Medan Zoo and PUD Pembangunan as the manager of Medan Zoo are said to be quite optimal in transparency to provide information on governance activities at Medan Zoo. However, the accountability of the management in being responsible for performance is not yet optimal and community participation in decision-making still needs to be considered so that the community can participate in providing input to improve animal welfare at Medan Zoo.*

**Keywords:** Governance, Medan City Government, Medan Zoo

---



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.  
<https://talenta.usu.ac.id/sajjana>

## 1. PENDAHULUAN

Tata kelola merujuk pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, serta pengarahan yang menggambarkan interaksi pemerintah dengan masyarakat untuk memenuhi kepentingan publik. Oleh karena itu, tata kelola akan berjalan dengan baik apabila suatu pemerintahan memiliki wadah organisasi yang mendukung, serta adanya regulasi pendukung dari pemerintah. Tata kelola juga harus memiliki prinsip yang membangkitkan kepercayaan publik, seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, partisipasi, penegakan hukum dan transparansi. Menurut Mardiasmo (2009), Good Governance adalah sebuah konsep pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada pembangunan sektor publik. Dimana tujuan akhir yang akan dicapai adalah peningkatan pembangunan dan kesejahteraan publik, capaian ini akan terwujud jika pemerintahan menjalankan

Pemerintah Kota Medan, berperan sebagai penanggung jawab dan pengawas *Medan Zoo* yang termasuk sebagai fasilitas publik untuk tempat wisata dan edukasi bagi masyarakat. Sedangkan PUD berperan sebagai pengelola *Medan Zoo* dibawah naungan Pemerintah Kota Medan dan bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Kota Medan. PUD kota Medan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah No.12 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan. Dalam Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 Pasal 6 huruf c tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan, kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah meliputi: penyelenggaraan pengelolaan hotel, rumah susun, kolam renang, kebun binatang, pergudangan, pengelolaan sampah.

Tugas PUD sebagai BUMD difokuskan sebagai penyedia manfaat umum berupa barang / jasa sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan. Sebagai salah satu lembaga konservasi yang dikelola oleh PUD Pembangunan kota Medan, *Medan Zoo* telah mendapat izin sebagai taman satwa sesuai SK. Menhut No. 124 / Menhut-II / 2010. Namun dalam pengelolaannya, PUD sering mendapat sorotan dari pemerhati satwa serta lembaga konservasi lainnya karena pengelolaannya terhadap *Medan Zoo* tidak memenuhi unsur kesejahteraan hewan / animal welfare yang ditandai dengan kondisi kandang sempit dan kotor, satwa – satwa yang kelaparan, banyaknya kematian satwa, tidak adanya pengayaan kandang dan lain-lain.

Organisation of Animal Health (OIE) mengungkapkan bahwan kesejahteraan hewan / animal welfare mengacu pada kesejahteraan fisik dan psikologis seekor hewan yang digambarkan melalui cara hewan tersebut bebas mengekspresikan perilaku alaminya, bebas dari penderitaan, dan berada dalam kondisi sejahtera yang positif. Untuk mewujudkan kesejahteraan hewan di Indonesia terdapat aturan mengenai standar prinsip kesejahteraan hewan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No 95 Tahun 2012 Pasal 83 ayat 2 tentang Kesejahteraan Hewan yang dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi : (a) bebas dari rasa lapar dan haus; (b) bebas dari rasa sakit,

cidera dan penyakit; (c) bebas dari ketidaknyamanan, penganiayaan dan penyalahgunaan ; (d) bebas dari rasa takut dan tertekan; dan (e) bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Aplikasi APAPO memungkinkan pemohon mengurus paspor secara daring, mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan. Namun, dalam penerapannya, APAPO masih menghadapi beberapa kendala sehingga masih kurang untuk mendorong akuntabilitas pelayanan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Kota Batam, seperti kesulitan verifikasi email, masalah Nomor Induk Kependudukan yang tidak sesuai dengan data Dukcapil, jadwal perbaruan kuota yang tidak konsisten, dan masih perlunya fotokopi persyaratan. Selain itu, beberapa proses permohonan masih harus dilakukan secara manual, sehingga efektivitasnya belum maksimal. Untuk mengatasi masalah ini, sejak 27 Januari 2022, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memperbarui aplikasi APAPO menjadi M-Paspor. Diharapkan aplikasi baru ini dapat menyederhanakan proses pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Kota Batam, meningkatkan pelayanan yang sebelumnya berbelit-belit.

Landasan untuk mencapai kesejahteraan hewan di kebun binatang dapat dilihat dengan mengamati kondisi dan perilaku hewan, variabilitas detak jantung serta lingkungan hewan, hal ini mengacu pada The Five Freedoms untuk mencapai kesejahteraan yang baik dalam lembaga konservasi. Berdasarkan penjelasan diatas, untuk mencapai kesejahteraan satwa maka lima prinsip kebebasan hewan harus dipenuhi terlebih dahulu. Berikut uraian dari 5 Prinsip Kebebasan Hewan atau The Five Freedoms yang dicetuskan oleh OIE (World Organisation of Animal Health), yaitu:

**Tabel 1.1 Prinsip Kebebasan Hewan**

No.	Prinsip Kebebasan Hewan (Satwa)	Deskripsi
1	Bebas dari rasa lapar dan haus	Dengan tersedianya air bersih dan pakan yang sesuai secara alami untuk menjaga kesehatan dan kekuatan hewan.
2	Bebas dari rasa tidak nyaman	Dengan tersedianya lingkungan yang cocok, fasilitas sesuai dengan kebutuhan satwa terutama tempat berlindung dan tempat beristirahat.
3	Bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit	Dengan pencegahan sejak dini atau diagnosis yang tepat dan pengobatan.
4	Bebas untuk berkespresi alami	Dengan tersedianya luas ruangan yang sesuai, fasilitas tepat, dan interaksi antar spesies.
5	Bebas dari rasa takut dan tertekan	Dengan menjamin perlakuan dan kondisi hewan dengan menghindari tekanan mental.

Sumber: *Peneliti* (2025)

Penjabaran Tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa untuk mencapai kesejahteraan hewan / satwa maka bentuk kebebasan dan pemenuhan setiap kebebasan hewan harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pengelola kebun binatang. Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan *Medan Zoo*, yaitu Pemko Medan diharapkan memiliki kebijakan yang mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan, konservasi, pendidikan, dan keamanan. Kebijakan tersebut juga mencakup standar perawatan yang tinggi untuk semua hewan yang dipelihara di kebun binatang tersebut, serta pemantauan terus menerus terhadap kondisi kesehatan dan kebahagiaan hewan. Karena kebun binatang yang umumnya berfungsi sebagai tempat konservasi, edukasi, objek wisata dan rekreasi juga dapat berpotensi sebagai upaya perawatan dan perkembangbiakan berdasarkan etika dan kesejahteraan hewan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-evaluatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis proses pembangunan Zona Integritas (ZI) di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara (FKep USU), sementara sifat evaluatif bertujuan menilai tingkat implementasi pembangunan ZI serta mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi ideal (*das Sollen*) dan kondisi empiris di lapangan (*das Sein*). Penelitian dilaksanakan di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam proses pembangunan ZI. Informan penelitian meliputi pimpinan fakultas (Dekan dan Wakil Dekan), koordinator Tim ZI, penanggung jawab enam komponen pengungkit, serta perwakilan pengguna layanan, yaitu dosen dan mahasiswa, guna memperoleh perspektif yang berimbang.

Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi teknik yang mencakup wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan kunci, observasi non-partisipan terhadap fasilitas layanan, media sosialisasi ZI, dan proses pelayanan, serta studi dokumentasi dengan menelaah dokumen-dokumen pendukung seperti Surat Keputusan Tim ZI, rencana aksi, Standar Operasional Prosedur (SOP), laporan evaluasi internal, dan materi sosialisasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahapan kondensasi data, penyajian data dalam bentuk narasi dan matriks, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## 3. HASIL & PEMBAHASAN

Pemko Medan membutuhkan tata kelola sebagai sistem yang mengatur dan mengoperasikan organisasi pemerintahan demi memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Kebun binatang berfungsi sebagai lembaga konservasi untuk kepentingan umum dalam memberikan pendidikan, penelitian, konservasi, dan rekreasi bagi masyarakat sehingga Pemko Medan berperan besar dalam menetapkan regulasi dan kebijakan yang meliputi peraturan mengenai perizinan, jenis satwa yang boleh dipelihara, serta pengawasan terkait kesehatan dan keamanan hewan serta pengunjung, melakukan pengawasan dan monitoring terkait kesehatan dan keamanan hewan serta pengunjung, serta memastikan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk ikut serta dalam pengelolaan kebun binatang untuk mencapai kesejahteraan satwa agar sesuai dengan standar pengelolaan kebun binatang.

Melalui pandangan Mahsun (2018), tata kelola pemerintahan yang baik akan tercapai apabila prinsip tersebut terpenuhi. Prinsip ini meliputi tiga aspek yang saling berkaitan, apabila salah satu dari ketiga aspek ini tidak berjalan dengan optimal maka akan berpengaruh pada aspek lainnya. Ketiga aspek tersebut adalah aspek transparansi, aspek akuntabilitas dan aspek partisipasi.

### 3.1 Aspek transparansi

Transparansi atau keterbukaan merupakan prinsip persamaan yang harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh orang yang berkepentingan, hal ini untuk menjaga objektivitas dalam suatu pemerintahan. Adapun tujuan dari aspek transparansi ini adalah terciptanya kondisi yang terbuka bagi orang – orang yang berkepentingan maupun masyarakat untuk mengakses informasi apapun terkait situasi dan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil wawancara dengan Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan menjabarkan bahwa dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, Pemko Medan pasti transparan dalam menyampaikan segala informasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan serta tata kelola pemerintahan guna membentuk pemerintahan yang adil, transparan, akuntabel, dan efisien dalam melayani masyarakat serta memajukan kesejahteraan publik. Dalam tata kelola terhadap *Medan Zoo*, Pemko Medan sebagai penanggungjawab yang bertugas mengawasi, menyusun dan mempublikasikan kebijakan, serta membuat standar operasional terkait aspek kesejahteraan hewan dan perlindungan lingkungan dalam pengelolaan *Medan Zoo*, sudah pasti transparan dalam menjalankan tugas dan fungsinya

Hal ini dapat dilihat dari mudahnya informasi yang bisa diakses oleh publik melalui portal Pemko Medan atau artikel berita lainnya, mulai dari informasi mengenai visi dan misi Pemko, informasi mengenai layanan publik, anggaran dan keuangan, peraturan dan kebijakan daerah, program pemerintah, kegiatan walikota dan pejabat lainnya, serta pengumuman resmi terkait

kebijakan atau acara penting di Kota Medan. Dalam hal ini, transparansi bukan hanya dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah, namun dalam kegiatan tata kelola untuk *Medan Zoo*, dapat membangun kepercayaan masyarakat, dan mendukung upaya pelestarian serta pendidikan terkait satwa dan lingkungan.

Hasil wawancara dengan Manajer *Medan Zoo* menjabarkan bahwa kegiatan pengelolaan *Medan Zoo* sudah pasti dilakukan secara transparan, seluruh informasi terkait hewan dan fasilitas yang ada sudah diinformasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan, serta publik dan pengunjung, mulai dari jenis satwa, kondisi dan kesehatan satwa, pengelolaan *Medan Zoo* sudah pasti dilakukan dengan transparan. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan, menghasilkan kesimpulan bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan seperti tata kelola pemerintahan harus dilakukan secara transparan. Aspek transparansi dalam kegiatan tata kelola guna meningkatkan akuntabilitas dari setiap lembaga dan organisasi dalam mengelola sarana untuk kepentingan publik. Aspek transparansi sangat penting dalam kegiatan tata kelola *Medan Zoo*, karena tata kelola *Medan Zoo* meliputi kesejahteraan satwa, pencegahan pengelolaan sumber daya, meningkatkan kepercayaan publik serta akuntabilitas manajemen.

### 3.2 Aspek Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip dimana suatu perusahaan / pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar agar kegiatan pemerintahan yang dikelola berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar untuk memastikan bahwa individu, organisasi, atau lembaga yang memegang kekuasaan bertindak secara transparan, bertanggung jawab, dan etis dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari akuntabilitas adalah membuat pemerintahan atau organisasi menjadi lebih efisien, adil, dan responsif dengan memastikan bahwa lembaga, pemerintah, atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan mereka serta transparan dalam proses pengambilan keputusan, dan patuh pada pengawasan publik.

Hasil wawancara dengan Bapak Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan menjabarkan bahwa sebagai penanggungjawab atas *Medan Zoo*, Pemko Medan harus memastikan bahwa organisasi dan lembaga yang memegang kekuasaan atas *Medan Zoo*, bertindak secara transparan dan wajar dengan mengawasi kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Selain itu, sebagai penanggungjawab atas *Medan Zoo*, Pemko Medan harus memastikan bahwa setiap direktur PUD Pembangunan bertindak secara transparan dan bertanggung jawab atas setiap usaha yang dijalankan. Aspek akuntabilitas oleh Pemko Medan adalah bertanggungjawab

terhadap pengelolaan *Medan Zoo* dengan memastikan bahwa hewan-hewan di *Medan Zoo* dirawat dengan baik dan diperlakukan sesuai dengan tujuan konservasi dan standar kesejahteraan satwa.

Hasil wawancara dengan Bapak Direktur Utama Keuangan dan SDM PUD Pembangunan menjabarkan bahwa PUD Pembangunan menjalankan tugas dan fungsinya secara transparan dan bertanggung jawab kepada pengawas atau Pemko. PUD sebagai perusahaan umum daerah mengelola semua usaha yang dijalankannya secara mandiri, karena PUD bukan hanya mengelola *Medan Zoo* tetapi juga kolam renang, pergudangan, rumah susun, dan lainnya. Oleh karena itu, sebagai pengelola *Medan Zoo*, melalui aspek akuntabilitas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan satwa di *Medan Zoo*, PUD Pembangunan bertanggung jawab untuk memastikan kualitas makanan, perawatan hewan, kesehatan, kebersihan kandang, dan program rehabilitasi atau konservasi. PUD Pembangunan juga bertanggung jawab atas layanan yang diterima pengunjung. Dalam hal ini yaitu dengan menjaga kualitas fasilitas, keamanan, pendidikan, dan kenyamanan pengunjung kebun binatang. Selanjutnya untuk meningkatkan layanan secara berkelanjutan, masukan dari pengunjung juga harus didengar dan ditindaklanjuti. PUD juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang diperoleh cukup untuk pakan hewan, gaji karyawan, dan hal-hal lainnya. Jika pemasukan tidak cukup untuk menutupi biaya, PUD juga tetap bertanggung jawab untuk mencari vendor untuk membantu mengelola bisnisnya.

Hasil wawancara dengan Ibu manajer *Medan Zoo* menjabarkan bahwa saat ini *Medan Zoo* sedang dalam tahap berbenah, sehingga sistem manajemen *Medan Zoo* juga berubah. Akuntabilitas manajemen di *Medan Zoo* bertindak secara transparan dan bertanggung jawab atas hewan dan fasilitas yang tersedia bagi pengunjung. Sistem pertanggungjawaban kinerja yang diterapkan oleh manajer *Medan Zoo* saat ini dilakukan dengan mengisi Google Form setiap hari yang didalamnya berupa: Bagaimana kegiatan pegawai? Apa saja tantangan yang Anda hadapi? Bagaimana keadaan kesehatan hewan saat ini? Bagaimana keadaan hewan dalam kandang? dan lainnya. Hasil dari Google Form ini nantinya akan direkap dan dilaporkan kepada PUD Pembangunan dan pihak pengawas sebagai bentuk dari tanggungjawab PUD terhadap kinerjanya.

Wawancara dengan tenaga medis *Medan Zoo* menjabarkan bahwa *Medan Zoo* benar-benar transparan dan bertanggung jawab dalam hal akuntabilitas. Dalam hal memenuhi 5 Freedoms, *Medan Zoo* dikatakan sudah cukup memenuhi 5 kesejahteraan hewan tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa *Medan Zoo* bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan hewan. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan diatas, menghasilkan kesimpulan bahwa dalam menjalankan kegiatan tata kelola pemerintahan aspek akuntabilitas dijalankan guna mencapai tujuan yang akan dicapai. Aspek akuntabilitas penting untuk memastikan sistem tata kelola di *Medan Zoo* dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan satwa melalui 5 Freedoms dan fasilitas memadai untuk pengunjung. Dalam hal perawatan satwa, akuntabilitas dari setiap pihak yang terlibat dalam tata

kelola *Medan Zoo* juga penting karena apabila terjadi kelalaian, maka akan berdampak buruk pada kesehatan dan kesejahteraan hewan. Maka dari itu, untuk menjaga standar kesejahteraan yang tinggi bagi *Medan Zoo*, maka dibutuhkan sistem tata kelola serta sistem pengawasan yang ketat, efisien dan akuntabel oleh PUD sebagai pengelola *Medan Zoo* dan Pemko Medan sebagai pengawas *Medan Zoo*.

Akuntabilitas juga berperan dalam pengelolaan keuangan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran, yang berasal dari dana publik atau dana yang diperoleh dari pengunjung atau dari lembaga pecinta dan pelindung hewan. Dengan adanya akuntabilitas, maka dapat dipastikan bahwa setiap anggaran akan digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk pemeliharaan fasilitas, program konservasi, dan peningkatan layanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa *Medan Zoo* dikelola secara profesional, etis, dan bertanggung jawab.

### 3.3 Aspek Partisipasi

Partisipasi merupakan keterlibatan seseorang dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam proses pengambilan keputusan publik, keterlibatan seseorang baik sebagai perwakilan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk berkontribusi dalam menyampaikan aspirasinya guna mencapai tujuan yang akan dicapai oleh suatu organisasi atau pemerintahan. Adapun tujuannya dari aspek partisipasi adalah melibatkan publik maupun pemangku kepentingan lainnya dalam tata kelola pemerintah sehingga dapat memperkuat demokrasi dan mendorong kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, partisipasi atau keterlibatan publik juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Hasil wawancara dengan Bapak Kabag Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Medan menjabarkan bahwa Pemko Medan sebagai penanggungjawab *Medan Zoo* secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan dan penyampaian aspirasi untuk meningkatkan tata kelola di *Medan Zoo*, yang di dalamnya termasuk kesejahteraan satwa. Selain itu, sebagai penanggungjawab, Pemko membuat kebijakan dan peraturan tentang kesejahteraan satwa, seperti standarisasi lembaga konservasi dan standarisasi kesejahteraan satwa. Dalam hal partisipasi terkait dana untuk *Medan Zoo*, tidak dapat diberikan baik kepada PUD Pembangunan maupun *Medan Zoo* karena dana telah diberikan kepada PUD Pembangunan sejak awal untuk mengelola usahanya secara mandiri, namun apabila dana yang dibutuhkan bersifat mendesak seperti untuk memberi pakan hewan, maka Pemko bersedia memberikan partisipasi berupa dana di kemudian hari.

Hasil wawancara dengan Ibu Manajer *Medan Zoo* menjabarkan bahwa dalam hal partisipasi, manajer *Medan Zoo* tentu melibatkan beberapa pegawai, mulai dari bagian administrasi, keeper, dan tenaga medis, untuk menyampaikan aspirasi mereka guna meningkatkan kesejahteraan di *Medan Zoo*. Aspirasi biasanya disampaikan melalui rapat, yang diadakan setiap bulan sekali. Namun, jika ada kendala mendesak terkait satwa, manajer akan mengadakan rapat yang juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya diluar pegawai *Medan Zoo*, seperti perwakilan PUD Pembangunan sebagai pengelola *Medan Zoo*, perwakilan Pemko sebagai pengawas dan penanggungjawab *Medan Zoo*, serta perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam pengambilan keputusan untuk *Medan Zoo*, masyarakat akan segera dilibatkan melalui kotak saran yang akan diletakkan di depan pintu masuk *Medan Zoo*.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan diatas, menghasilkan kesimpulan bahwa dalam kegiatan tata kelola pemerintahan, aspek partisipasi juga berperan penting. Partisipasi dalam tata kelola *Medan Zoo* dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan karena melibatkan pemerintah, masyarakat, pengunjung serta pemangku kepentingan lainnya. Aspek partisipasi dalam pengelolaan *Medan Zoo* dapat membantu memastikan bahwa kebijakan dan keputusan yang diambil oleh manajemen sudah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi membantu proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dalam tata kelola *Medan Zoo*.

#### 4. KESIMPULAN

Penjabaran indikator yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa transparansi telah berjalan dengan baik dengan adanya kondisi yang terbuka untuk menyediakan informasi yang material dan relevan agar mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dan juga masyarakat terkait kegiatan tata kelola yang ada di *Medan Zoo*. Namun akuntabilitas dan partisipasi masih belum optimal. Akuntabilitas Pemko Medan sebagai pihak penanggungjawab dan pengawas serta PUD Pembangunan sebagai pihak pengelola *Medan Zoo* masih belum optimal dalam mempertanggungjawabkan kinerja hal ini ditandai dengan tidak adanya sistem tata kelola kegiatan yang dijalankan mulai dari perencanaan, pelaksanaan program apa yang akan dijalankan serta evaluasi kegiatan yang telah berjalan serta pembuatan papan informasi di depan kandang satwa karena *Medan Zoo* merupakan lembagakonservasi, pendidikan serta tempat rekreasi bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program serta evaluasi kegiatan, masih perlu diperhatikan lagi agar masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam memberikan masukan dan kritik untuk meningkatkan kesejahteraan satwa di *Medan Zoo*

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Eccleston, KJ. 2009. Animal Welfare di Jawa Timur; Model Kesejahteraan Binatang Jawa Timur. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Hetifah, S. 2009. Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Khairudin., Soewito., Aminah. 2021. Potret Kepercayaan Publik, Good Governance dan E-Government di Indonesia. Banyumas: CV Amerta Media
- Mahsun, M. 2018. Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Pertama). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta
- Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Moleong, Lexy. J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulia, Muji., Khalil, Zakki Fuad. 2020. Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Syariah di Aceh. Aceh: Sahifah
- Nofianti, Ley. 2015. Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah. Pekanbaru: LPPM UIN Suska Riau
- Pasolong, Harbani. 2019. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tim Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. 2020. Pedoman Kesejahteraan Hewan dalam Pengangkutan Hewan. Jakarta Selatan: Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner
- Wijaya., Pudjiarti, Emeliana Sri., Winarni, Aris Toening. 2018. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Demak: Penerbit Pustaka Magister